

**TINDAKAN PEMUSNAHAN (*EXTERMINATION*) TERHADAP ETNIS
HAZARA DI AFGHANISTAN DAN PAKISTAN DITINJAU DARI
HUKUM INTERNASIONAL**

Intan Imadhani

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing:

1. Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
2. Muhammad Insan Tarigan, S.H., M.H.

Abstrak

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apakah negara dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dapat mengadili pelaku yang telah melakukan tindakan pemusnahan (*extermination*) terhadap etnis Hazara yang dikenal sebagai salah satu etnis minoritas muslim Syiah di Afghanistan dan Pakistan ditinjau dari Hukum Internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemusnahan tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan internasional serius yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Negara tempat terjadinya kejahatan berkewajiban melaksanakan yurisdiksinya untuk menghukum pelaku tersebut, sebagaimana Konvensi Genosida 1948 dan Konvensi Jenewa 1949 telah mengatur bagi negara pihak untuk mengutamakan pengadilan nasionalnya dalam menghukum para pelaku. Namun, diketahui bahwa negara Afghanistan dan Pakistan tidak bersedia (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) dalam menindaklanjuti perkara yang terjadi. Dengan demikian juga, ICC yang memiliki sifat *complementary* berarti ia dapat mengambil alih yurisdiksi pengadilan nasional negara atas pelaku kejahatan tersebut berdasarkan Pasal 13 Statuta Roma 1998. Bagi Afghanistan yang sebagai negara pihak, pelaksanaan yurisdiksi ICC berdasarkan adanya pengaduan negara yang bersangkutan kepada penuntut umum. Sedangkan bagi Pakistan yang bukan negara pihak, pelaksanaan yurisdiksi ICC dapat didasarkan pada DK-PBB yang bertindak dalam kerangka Bab VII Piagam PBB, selain itu juga dapat berdasarkan kewenangan *proprio motu*.

Kata Kunci: Pemusnahan, kejahatan internasional serius, yurisdiksi, Mahkamah Pidana Internasional, Afghanistan dan Pakistan.

**EXTERMINATION OF HAZARA ETHNIS IN AFGHANISTAN AND
PAKISTAN REVIEWED FROM INTERNATIONAL LAW**

Intan Imadhani

Law Faculty Surabaya University

Advisors:

1. Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.

2. Muhammad Insan Tarigan, S.H., M.H.

Abstract

This thesis aims to analyze whether the state and the International Criminal Court (ICC) can prosecute perpetrators who have committed extermination of Hazara ethnic groups known as one of the ethnic Shiite minorities in Afghanistan and Pakistan in terms of International Law. The results of the study indicate that the act of extermination can be said to be a serious international crime which is a serious violation of Human Rights. The country where the crime took place is obliged to carry out its jurisdiction to punish the perpetrator, as the 1948 Genocide Convention and the 1949 Geneva Convention have arranged for the state party to prioritize its national court in punishing the perpetrators. However, it is known that Afghanistan and Pakistan are unwilling or unable to follow up on the case. Likewise, the ICC which has complementary nature means that it can take over the jurisdiction of the state national court for the perpetrators of crimes under Article 13 of the Rome Statute 1998. For Afghanistan as a state party, the implementation of ICC jurisdiction is based on the state's complaints to prosecutor. As for Pakistan, which is not a state party, the implementation of the ICC jurisdiction can be based on the UN Security Council acting on the Chapter VII of the Charter of the United Nations, besides that it is also can based on the authority of Proprio Motu.

Keywords: extermination, serious international crime, jurisdiction, International Criminal Court, Afghanistan and Pakistan.